BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada isu-isu keamanan tradisional identik dengan kata 'perang'. Dimana dua negara atau lebih terlibat dalam perselisihan bersenjata akibat dari perasaan saling terancam. Hal ini dilakukan oleh negara yang berdaulat untuk dapat mengamankan keutuhan teritorialnya dan keamanan warganya dari seluruh ancaman luar. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman militer maupun agresi negara lain. Ini berarti bahwa negara menjadi aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional sehingga bisa memperhitungkan untung-rugi dari setiap tindakan demi kepentingan keamanan nasional.

Pasca perang dingin, isu-isu keamanan menjadi semakin kompleks. Perlombaan senjata termasuk dalam isu keamanan yang hingga saat ini masih terjadi di berbagai belahan dunia seperti di kawasan Asia Selatan dengan tokoh utama India dan Pakistan. Konflik yang berkepanjangan antara India dengan Pakistan memaksa keduanya untuk terus meningkatkan persenjataan konvensional maupun peningkatan persenjataan strategis berteknologi canggih. Terlebih adanya pandangan bahwa pengembangan teknologi canggih militer suatu negara akan mempengaruhi tingkat *bargaining position* suatu negara di mata internasional. Hal tersebut memacu India untuk terus meningkatkan teknologi militernya termasuk

Disaat dunia sedang melakukan upaya nonproliferasi, India yang secara terus menerus mengembangkan teknologi nuklir melakukan uji coba nuklir untuk pertama kalinya secara terbuka pada bulan Mei tahun 1998 yang memicu meningkatnya tensi hubungan India-Pakistan. Hingga dua minggu setelah India melakukan Uji Coba tersebut, Pakistan juga melakukan uji coba nuklir atas dasar membalas tindakan India yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.

Melihat peningkatan kapasitas nuklir India di kawasan Asia Selatan dengan mengadakan uji coba nuklir secara terbuka tersebut telah mengundang perhatian banyak kalangan internasional terutama Amerika Serikat yang melihat India sebagai ancaman baru karena memiliki kekuatan nuklir yang sewaktu-waktu dapat mengancam keamanan internasional. Terlebih India menolak untuk menandatangani *Nuclear Non-Poliferation Treaty* (NPT) dan *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT). Amerika Serikat mengkritik keras atas tindakan yang dilakukan India tersebut. Untuk mencegah kemungkinan terburuk dari uji coba senjata nuklir tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap India. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana dampak dari sanksi ekonomi tersebut terhadap India. Pada akhirnya penulis mendeskripsikan fenomena tersebut dalam suatu tulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan judul: "*Dampak Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap India Pasca Uji Coba Nuklir Tahun 1998*".

B. Latar Belakang Masalah

Pasca perang dunia II, negara-negara di dunia menyadari pentingnya upaya pengawasan senjata terutama bagi negara-negara yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir yang memiliki daya rusak yang sangat besar. Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah akibat dari senjata nuklir maupun rudal tersebut, pada tahun 1968 lima negara yang memiliki senjata nuklir yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina telah sepakat untuk menandatangani *Nuclear Non-Proliferation Treaty.* Tujuan utama traktat tersebut yakni mencegah agar senjata nuklir beserta teknologinya tidak menyebar ke Negara–negara lain selain lima Negara tersebut.

Upaya-upaya pencegahan penyebaran senjata nuklir mulai berlaku pada tahun 1970. Meskipun hasil-hasil yang dicapai belum maksimal, tetapi negara-negara adidaya ini berupaya untuk mencapai kesepakatan dalam metode pengendalian maupun pengawasan senjata nuklir. Aktifitas pengendalian senjata ini merupakan konsekuensi dari meluasnya kekhawatiran terhadap bahayanya perang nuklir dan kesediaan negara-negara ini untuk bekerjasama satu sama lain dengan mewujudkan kesadaran umum akan ancaman perang itu terhadap sistem politik internasional.[1]

Kemudian pasca kemenangannya dalam perang dingin tahun 1991, Amerika Serikat berusaha untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan secara agresif mengkampanyekan rezim nonproliferasi. Pemerintahan Clinton meminta

---

[1]William D. Coplin dan Mersedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Edisi Kedua)*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hal 388.

perpanjangan waktu NPT yang tidak terbatas dan menegosiasikan *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) dan *Fissile Material Cut-Off Treaty* (FMCT).[2]

Beberapa Negara dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, misalnya di kawasan Asia Selatan mulai memerlihatkan kekuatan militernya, salah satunya adalah India. India terus mengembangkan teknologi persenjataannya yang di latar belakangi oleh konflik-konflik yang terjadi dengan negara tetangganya yaitu Pakistan. Dimana konflik-konflik tersebut membawa keduanya dalam perasaan tidak aman yang berkembang sehingga kedua negara ini terlibat dalam suatu persaingan persenjataan. Keduanya sama-sama saling ingin menunjukan kekuatan militernya sebagai upaya untuk mencegah serangan musuh apabila terjadi konflik yang merujuk pada kontak militer.

Hingga pada tanggal 11 dan 13 Mei 1998 India melakukan uji coba bom nuklir. India melakukan tes tersebut tanpa memberi peringatan sebelumnya kepada masyarakat internasional, sehingga menimbulkan banyak kecaman dari masyarakat internasional dan juga memancing kemarahan dari pihak Pakistan atas tindakan diam-diam yang dilakukan India. Uji coba bom nuklir tersebut berlangsung di Pokhran, wilayah padang pasir di India yang hanya berjarak 150 km dari perbatasan India-Pakistan. Operasi yang diberi sandi *Smiling Buddha* oleh India tersebut telah membuat sebuah kekhawatiran bagi pemerintah Pakistan. India sedang berusaha untuk menciptakan sebuah kekuatan yang mendominasi di kawasan Asia Selatan, hal ini memicu ketegangan antara kedua negara. Tes uji coba nuklir ini memicu reaksi berbagai negara di dunia sekaligus menjadi pemicu

---

[2]Stephen P. Cohen and Sunil Dasgupta, *Arming Without Aiming; India's Military*

perlombaan senjata nuklir secara terbuka antara India dan Pakistan yang mahal dan berbahaya yang menjadi sebuah ancaman bagi stabilitas regional di kawasan Asia Selatan.

Dua minggu setelah India melakukan uji coba nuklir, pada tanggal 28 Mei 1998, Pakistan mulai memperlihatkan kekuatan militernya, melalui Perdana Menterinya Nawaz Sharif Pakistan mengumumkan bahwa akan melancarkan uji coba senjata nuklir secara terbuka, dan untuk yang pertama kalinya yang diberi sandi *Chagai I* , ini merupakan suatu reaksi atas uji coba nuklir yang dilakukan India sebelumnya. Operasi tersebut dilakukan di kawasan Baluchistan, yang dekat dengan perbatasan Afganistan. Dalam uji coba itu, para ilmuwan Pakistan meledakkan lima komponen nuklir di bawah tanah.[3] Tidak puas dengan hanya menyamai lima tes nuklir India, pada 30 Mei Pakistan melanjutkan lagi peledakan perangkat nuklir yang keenam. Pada saat yang sama Perdana Menteri mengumumkan bahwa pemerintahnya akan segera siap untuk dapat mulai memimpin perang nuklir menggunakan rudal.[4]

Seperti India, Pakistan secara aktif bekerja untuk menghasilkan lebih banyak hulu ledak. Untuk menghadapi ancaman militer India, Pakistan meningkatkan kapasitas persenjataannya. Pakistan melakukannya tidak saja untuk

---

[3] Renne R.A Kawilarang, "*28-5-1998: Pakistan Uji Coba Senjata Nuklir*", dalam http://dunia.news.viva.co.id/news/read/317601-28-5-1998--pakistan-ujicoba-senjata-nuklir, diakses tanggal 15 Juni 2013.

[4] **Donald Johnson,** "*India-Pakistan Relations: A 50-Year History*", dalam

menangkal serangan India melainkan juga untuk melakukan serangan balasan serupa atau bahkan lebih besar dari apa yang dilakukan India. Motif Pakistan mengembangkan program senjata nuklir digunakan untuk menghambat kemungkinan invasi negara lain ke Pakistan, terutama India. India dengan doktrin militer ofensifnya intens melakukan peningkatan teknologi persenjataan nuklirnya. Atas dasar tersebut, Pakistan khawatir India dapat menggunakan kekuatan persenjataan militer terhadap negaranya kapan saja.

Ketegangan antara India dan Pakistan menjadi salah satu permasalahan yang tidak kunjung menemukan titik temu perdamaian yang stabil. Baik India maupun Pakistan menganggap satu sama lain merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat menyerang dan mengganggu stabilitas masing-masing negara. Persepsi tersebut menyebabkan kedua negara tidak pernah berpandangan positif terhadap satu sama lain. Sehingga membuat isu perlombaan senjata antara kedua negara ini semakin menegangkan.

Perkembangan rudal di Asia Selatan memiliki implikasi keamanan yang serius di tingkat regional maupun di tingkat global. Pada tingkat regional, inventarisasi rudal telah meningkatkan ekskalasi ketegangan hubungan antara India-Pakistan. Sedangkan pada tingkat global, perkembangan senjata nuklir di Asia Selatan menimbulkan implikasi negatif yang cukup serius pada rezim non-poliferasi dan dapat mendorong negara-negara lain untuk mengejar program nuklir maupun rudal seperti yang dilakukan India.[5]

---

[5] Suresh Dhanda, "Dangers Missile Race in South Asia: an India-Pakistan Perspective",

Ancaman kekuatan militer India yang provokatif dan ofensif memicu kekhawatiran mengenai keamanan nuklir. India memutuskan untuk terus mengembangkan teknologi nuklir dan membangun senjata nuklir. Terlebih India juga menolak menandatangani *Nuclear Non-Poliferation Treaty* (NPT) dan perjanjian internasional lain yang dapat menghambat dan membatasi pengujian senjata nuklir.[6]

Uji coba nuklir itu tidak hanya menyentak rezim nonproliferasi tetapi juga memecahkan moratorium global yang telah diadopsi dari *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) terhadap uji coba nuklir yang telah ada sejak Juli 1996.[7] Dimana sebelumnya pada tanggal 20 Juni 1996 Duta Besar India Arundhati Ghose, sempat mengikuti negosiasi CTBT pada Konferensi Perlucutan Senjata tetapi kemudian mengundurkan diri dan enggan untuk menandatangani CTBT, serta secara terbuka menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian itu akan merugikan kepentingan keamanan India.[8] Oleh karena itu, India muncul sebagai lawan terkuat perjanjian itu. India menggunakan kata "keamanan" sebagai alasan untuk menarik advokasi perjanjian pengawasan senjata.

Sebagai dampak dari tes dan pengembangan senjata nuklir tersebut, negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi kepada India dengan tujuan untuk menekan mereka untuk mematuhi

---

[6] *"Produksi Nuklir Pakistan Bakal Melebihi Prancis"*, dalam http://www.voa-islam.com/lintasberita/eramuslim/2011/05/19/14783/produksi-nuklir-pakistan-bakal-melebihi-prancis/, diakses tanggal 15 September 2013.

[7] Dinshaw Mistry, "Domestic-International Linkages: India And The Comprehensive Test Ban Treaty", dalam http://cns.miis.edu/npr/pdfs/mistry61.pdf diakses tanggal 20 Maret 2014.

[8] Stephen P. Cohen and Sunil Dasgupta, *op.cit*, hal 103.

rezim nonproliferasi internasional dengan syarat menandatangani beberapa perjanjian nonproliferasi seperti CTBT.[9]

Presiden Clinton segera bereaksi terhadap ledakan percobaan nuklir India dengan mengkritik keras. Sebagai negara yang menentang rezim ini, India menjadi target utama dari kebijakan nonproliferasi Amerika Serikat. Para pejabat senior Amerika Serikat menyatakan bahwa tujuan Washington adalah untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan program nuklir negara yang bukan penandatangan NPT.[10] Presiden Amerika berpendapat bahwa tindakan India melanggar *Comprehensive Test Ban Treaty* yang didukung oleh 149 negara dan perjanjian non-proliferasi yang ditandatangani oleh 185 negara. Untuk itu Amerika segera menyerukan sanksi ekonomi terhadap India termasuk penundaan bantuan ekonomi dan larangan pinjaman bank Amerika.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut *"Bagaimana dampak dari sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Perekonomian India pasca uji coba nuklir tahun 1998?"*

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami suatu fenomena serta menjawab pokok permasalahan yang ada diperlukan kerangka dasar pemikiran. Kerangka dasar pemikiran

---

[9]Rajat Ganguly, *"India, Pakistan and the Kashmir Dispute"*, dalam Asian Studies Institute & Centre for Strategic Studies.

merupakan bagian yang terdiri dari beberapa uraian yang menjelaskan variable-variabel dan hubungan antara variabel berdasarkan konsep definisi tertentu dan teori-teori, sehingga kegiatan penelitian bersifat ilmiah. Karena pada dasarnya teori dapat dipergunakan sebagai alat deskripsi, eksplanasi, maupun alat prediksi sehingga mempermudah dalam memahami permasalahan secara logis.[11]

Dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu sarana yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial yang hendak diteliti dan yang telah diperoleh dengan landasan pemikiran yang digunakan sebagai dasar atau pedoman penelitian.

1. Teori Sistem

Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, maupun variabel-variabel yang terorganisir baik berbentuk fisik maupun bukan fisik yang menunjukan suatu kumpulan yang saling berhubungan dan saling tergantung serta berinteraksi satu sama lain menuju satu atau lebih tujuan maupun sasaran akhir dari sistem.

Pada prinsipnya setiap sistem selalu terdiri dari, pertama, Objek yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Kedua, berisikan atribut yang menentukan kualitas atau sifat sistem dan objeknya. Ketiga, Memiliki hubungan internal antara objek-objek di dalamnya. Keempat, sistem hidup dalam satu lingkungan tertentu. Oleh karena itu, dalam sebuah sistem terdapat perangkat yang dapat menerima masukan (*input*) dan kemudian masukan itu dapat menghasilkan suatu hasil (*output*). Selanjutnya konsep sistem tersebut

berkembang menjadi sebuah "Teori Sistem" (*The systems theory*).Seperti yang dikemukakan oleh Anatol Rapoport[12]:

> "*a whole which functions as whole by virtue of the interdependence of its parts is called a system, and the method which aims at discovering how this is brought about in the widest variety of systems has been called general system theory*"[13]

mengungkapkan bahwa sesuatu yang berfungsi secara keseluruhan berdasarkan saling ketergantungan antara bagian-bagiannya yang disebut sistem, dan metode yang bertujuan untuk menemukan berbagai macam sistem secara luas disebut dengan teori umum sistem.

Teori sistem juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian pernyataan tentang hubungan antara variabel-variabel yang independen maupun dependen yang saling berinteraksi satu sama lain. Seperti perubahan dalam satu atau lebih variabel yang disertai maupun diikuti oleh perubahan variabel lain.[14]

Sistem dapat mendeskripsikan tentang sebuah kerangka teoritis dalam upaya mengidentifikasi data mengenai suatu fenomena politik maupun ekonomi yang terjadi. Terdapat integrasi hubungan dalam variabel-variabel politik, seperti hubungan negara-negara dalam suatu sistem internasional

---

[12] Anatol Rapoport adalah pelopor dan pemimpin-tokoh ilmu sistem, studi konflik & kerjasama, dan penelitian perdamaian. Dia adalah profesor Psikologi Emeritus dan Matematika di Universitas Toronto, Kanada.

[13] Anatol Rapoport, 'Foreword", Walter Buckley, ed., *Modern Systems Research for the Behavioral Scientists* (Chicago:Aldine Publishing Company, 1968), p.xvii, dalam James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr, *Contending Theories of International Relations*, J.B. Lippincott Company, New York, 1971, hal 102.

[14] *Ibid.*

yang melibatkan pemerintah dunia. Interaksi yang terjadi antar variabel politik tersebut akan dapat saling mempengaruhi.[15]

Teori umum sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu komponen sistem, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, dan keluaran sistem. Pertama adalah komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Komponen tersebut saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem ataupun bagian-bagian dari sistem yang memiliki sifat-sifat tertentu untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Sehingga komponen-komponen itu akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Bagian tersebut bersifat dinamis, berinteraksi satu sama lain, saling berhubungan, dan saling tergantung satu sama lain.

Kedua adalah batas sistem. Batas sistem merupakan suatu daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya maupun dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini akan mempertegas ruang lingkup sistem tersebut.

Ketiga, Lingkungan luar sistem. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar batas sistem yang mempengaruhi kerja sistem. Lingkungan luar ini dapat bersifat menguntungan dan dapat juga

berupa energi positif untuk kelangsungan sistem yang harus dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar sistem yang merugikan berupa energi negatif yang dapat mengganggu kelangsungan sistem sehingga harus ditahan dan dikendalikan.

Keempat, Penghubung sistem. Penghubung sistem merupakan media yang menghubungkan antara satu subsistem satu dengan subsistem yang lain. Dengan begitu, diantara subsistem satu dengan subsistem yang lain dapat berinteraksi dan membentuk satu kesatuan.

Kelima, masukan sistem (*input*). Masukan sistem adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem yang dapat mempengaruhi dalam penentuan keluaran sistem. Masukan ini dapat berupa dukungan, permintaan, maupun tuntutan.

Keenam, keluaran sistem (*output*). Keluaran sistem adalah hasil dari masukan energi yang diproses dan diklasifikasikan menjadi suatu keluaran yang berguna.

Dalam sistem bisa saja terdapat Sistem yang lebih kecil (subsistem). Setiap subsistem memiliki batas-batas yang dapat membedakannya dari satu sama lain. Sistem memiliki *input* dan *output*, dimana *output* dari satu sistem terdapat kemungkinan menjadi input bagi sistem lain yang saling berhubungan. Ketika sistem digabungkan dalam dua arah, terjadi umpan balik. Dalam menganalisa sebuah sistem, dapat dibedakan antara keadaan

mempengaruhi keadaan sistem yang dapat menggangu keseimbangan suatu sistem. Dan *input* lain dapat memiliki dampak untuk mengubah karakteristik perilaku sistem yang memungkinkan untuk mencapai keseimbangan.

Input dan *output* adalah dua fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat. Apapun *output* dari suatu sistem politik, akan dikembalikan kepada struktur *input*. Struktur *input* akan bereaksi terhadap apapun yang dikeluarkan. Jika positif akan memunculkan dukungan terhadap sistem, sementara jika negatif akan memberikan dampak terhadap munculnya tuntutan atas sistem. Umpan balik *(feedback)* adalah situasi di mana sistem politik berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output.

Teori Umum Sistem dari David Easton didasarkan pada beberapa asumsi bahwa ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi yang sistematis untuk mengidentifikasikan fakta-fakta yang ditemukan dalam mengkaji suatu fenomena. Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data, yaitu data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan.

Diagram dibawah ini merupakan sebuah model sederhana suatu sistem

Gambar 1

Skema Sistem Politik David Easton

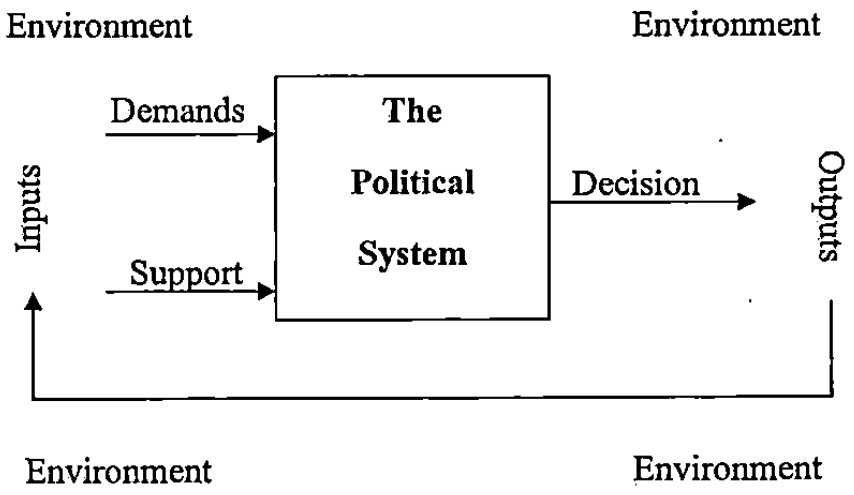

Sumber: David Easton, *A Framework For Political Analysis,* 1965

Easton menekankan 4 atribut yang perlu diperhatikan dalam mengkaji suatu sistem politik. Pertama, Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik. Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengerakkan roda kerja sistem. Kedua, *Input-output* dimana *Input* merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. *Input* yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan dan dukungan. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. *Output* terbagi menjadi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, diferensiasi dalam sistem. Sistem yang baik harus memiliki pembagian ruang kerja. Di masa modern tidak mungkin

Integrasi dalam sistem. Integrasi yang dimaksudkan adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.[16]

Input dalam bentuk tuntutan dan dukungan memberi makna yang berbeda pada sistem politik. *Input* yang berupa tuntutan dapat timbul baik di dalam lingkungan ataupun di dalam sistem itu sendiri. *Input* ini akan meberikan dampak berupa perubahan-perubahan yang terjadi sebagai gangguuan dalam sistem politik. Sedangkan *input* dalam bentuk dukungan merupakan tindakan atau orientasi yang dapat menunjukan dan mempertahankan sistem politik.[17]

Output berasal dari sistem politik dalam bentuk keputusan dan tindakan kebijaksanaan. *Output* akan dapat berubah menjadi umpan balik dalam lingkungan agar dapat memuaskan tuntutan dari beberapa anggota sistem itu, dan kemudian akan menggerakkan dukungan terhadap sistem itu. Tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang memunculkan tuntutan baru pada sistem politik itu.

Easton menyatakan bahwa di tingkat internasional mungkin akan menemukan set hubungan di mana nilai-nilai otoritatif dialokasikan. Tidak seperti beberapa sistem lain, sistem internasional tidak memiliki sesuatu yang dapat dipegang teguh atau legitimasi. Namun demikian, anggotanya membuat tuntutan dengan antisipasi bahwa tuntutan ini akan dikonversi menjadi output. Secara historis kekuatan besar baru, seperti berbagai jenis organisasi internasional, misalnya PBB, telah berhasil dalam menyelesaikan perbedaan-

perbedaan yang tidak dapat dinegosiasikan secara pribadi dan mereka diterima sebagai otoritatif.

Berbagai pengaruh tekanan yang mendekat pada suatu sistem politik baik itu yang berasal dari lingkungan luar maupun lingkungan dalam sistem itu sendiri, akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup sistem tersebut.

Mengadaptasi dari teori sistem yang di kemukakan oleh Easton, penulis berusaha menjelaskan teori yang sesuai dengan tema dalam diagram dibawah ini.

Gambar 2

Skema Sistem Ekonomi India

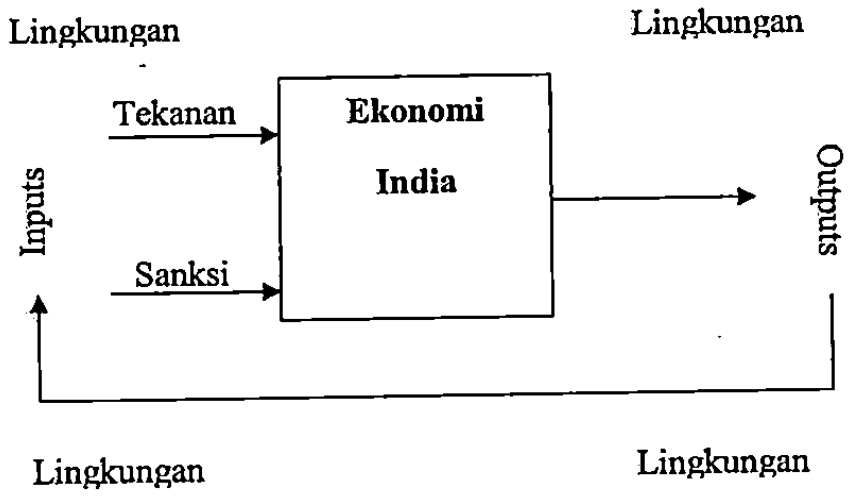

Sumber: Diadaptasi dari skema Sistem Politik David Easton

Sesuai dengan skema diatas, Perekonomian India mendapatkan tekanan yang berupa sanksi Ekonomi dari lingkungan luar yaitu Amerika Serikat.

bidang bantuan asing, perdagangan maupun investasi. Oleh karena itu, sanksi ekonomi tersebut dapat memberikan dampak sistemik terhadap perekonomian India. Amerika Serikat mengeluarkan suatu *executive order* yang menghimbau bagi Lembaga Pemerintahan, Bank-bank, dan pelaku bisnis Amerika lainnya untuk menghentikan bantuan kepada India maupun menghentikan kegiatan ekonomi dengan India.

Dengan begitu para pelaku ekonomi Amerika akan menghentikan kegiatan ekonomi dengan India. Sehingga, India akan mengalami penurunan kerja ekonomi terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Dan Lembaga Pemerintah Amerika Serikat menghentikan seluruh bantuannya, sehingga India mengalami penurunan arus modal asing yang juga berimbas pada penurunan cadangan devisa India.

2. Sanksi Ekonomi

Konsep sanksi secara umum didefinisikan sebagai tindakan yang diprakarsai oleh satu atau lebih pelaku internasional baik negara maupun organisasi internasional (pengirim) terhadap satu atau lebih negara lain (penerima) dengan tujuan untuk menghukum penerima dengan cara mencabut beberapa nilai seperti hak dari mereka untuk membuat penerima sesuai dengan norma-norma tertentu yang dianggap penting oleh pihak pengirim.[18] Jika hukuman adalah kondisi yang diperlukan untuk menciptakan kepatuhan,

[18] Johan Galtung, "On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples

maka hukuman telah menjadi tujuan otomatis dari sanksi yang tersebut. Jika diterapkan pada sistem internasional, hukuman memiliki orientasi yang cukup luas, yang berfungsi untuk memberikan sanksi negatif.[19]

Sanksi ekonomi umumnya dideklarasikan oleh satu atau sekelompok negara maupun organisasi internasional terhadap negara lain untuk mengisolasikannya dan memberikan dampak keadaan ekonomi internal yang sulit bagi pemerintah negara tersebut.[20] Tujuan dari sanksi ekonomi adalah sebagai hukuman (pencegahan), kepatuhan (pemaksaan), destabilisasi (subversi), pemberi isyarat, dan simbolisme (efek demonstratif). Sanksi ekonomi ini pada umumnya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggar terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan dengan dasar untuk memaksa perubahan dalam kebijakan target, atau menunjukkan kepada negara lain posisi pengirim sanksi mengenai kebijakan target.

Woodrow Wilson membuat pernyataan mengenai sanksi ekonomi yang mengatakan bahwa:

> *"If any member of the League breaks or ignores these promises with regard to arbitration and discussion, what happens, War? No not war but some-thing more tremendous than war. Apply this economic, peaceful, silent, deadly remedy and there will be no need for force. It is a terrible remedy. It does not cost a life outside the nation boycotted, but brings a pressure upon the nation which, in my judgment, no modern nation could resist. The boycott is what is substituted for war."*[21]

---

[19] *Ibid*, hal 380.

[20] Peter Wallensteen, "A Century of Economic Sanctions: A Field Revisited", dalam *Uppsala Peace Research Papers* No. 1 dalam http://www.uu.se/digitalAssets/18/18601_UPRP_No_1.pdf, diakses tanggal 21 April 2014.

[21] Woodrow Wilson's case for the League of Nations.C ompiled with his approval by Hamilton Foley. (Princeton, 1923) pp. 67, 71, 72. Dalam Fredrik Hoffmann, *The Functions of Economic Sanctions: A Comparative Analysis*, Journal of Peace Research, Sage Publications,

Dalam pernyataannya tersebut Wilson menjelaskan bahwa jika ada anggota Liga yang mengabaikan janji-janji yang sudah disepakati, dapat terjadi perang. Namun, kini perang tidak menjadi satu-satunya konsekuensi yang diterima. Tetapi dengan menerapkan unsur ekonomi yang damai sebagai obat mematikan dan akan sulit bagi negara untuk mendapatkan kekuatan. Hal ini tidak membutuhkan biaya bagi negara di luar negara yang diboikot, sehingga tidak ada bangsa modern bisa menolaknya. Boikot ini dapat menggantikan perang.

Kemudian mantan Menteri Luar negeri Amerika Serikat, John Foster Dulles menulis tentang, "*The great advantage of economic sanctions is that on the one hand they can be very potent, while on the other hand they do not involve that resort to force which is repugnant to our objective of peace.*"[22] Foster mengemukakan bahwa keuntungan besar dari sanksi ekonomi adalah bahwa di satu sisi mereka bisa menjadi sangat kuat, sementara di sisi lain mereka tidak melibatkan usaha-usaha pemaksaan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perdamaian.

Dampak yang dihasilkan dari sanksi ekonomi tersebut adalah melemahnya perekonomian negara target yang kemudian akan dapat mempengaruhi para pemimpin negara tersebut untuk mengubah kebijakan mereka. Melemahnya perekonomian negara target dapat ditandai dengan menurunnya sebagian atau

---

[22] Evans Clark, *Boycotts and Peace: A Report by the Committee on Economic Sanctions*, p. 21, (1932), dalam Fredrik HoffmannSource, *The Functions of Economic Sanctions: A Comparative Analysis*, Journal of Peace Research, Sage Publications, 1967, Vol. 4, No. 2 dalam

bahkan seluruh sektor ekonomi. Misalnya penurunan arus modal, kemunduran perdagangan internasional, penurunan tingakat investasi, dan penurunan cadangan devisa.[23]

Pelemahan ekonomi bisa juga diharapkan dapat menghasilkan konstituen domestik menjadi tidak puas dengan pemimpin-pemimpin mereka dan ketidakpuasan publik ini diharapkan mampu menciptakan insentif untuk menargetkan warga menginginkan perubahan pemerintahan dari perubahan kebijakan tertentu demikian mekanisme sanksi ekonomi didasarkan pada kekuatan pengalihan bahwa kebijakan itu akan memiliki.

Lingkungan ekonomi dan politik negara-negara sasaran dapat mempengaruhi hasil dari sanksi ekonomi. Seperti yang diharapkan, ekonomi lemah yang ditandai dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya inflasi sebagai efek dari sanksi ekonomi. Ekonomi yang lemah ini akan lebih memungkinkan dalam mengubah kebijakannya.

Di sisi lain, ukuran sanksi yang digunakan dalam sanksi ekonomi, menggambarkan stabilitas politik yang lebih tinggi dengan keberhasilan sanksi ekonomi. Alasannya dapat dijelaskan oleh fakta bahwa rezim yang lemah tidak terlalu mampu merespon atau karena mereka menganggap biaya mengubah kebijakan mereka sebagai lebih tinggi daripada rezim lebih stabil. Hal ini juga dapat disebabkan karena fakta bahwa rezim yang lemah yang ditandai dengan sering perubahan pemerintah perlu menegaskan kembali

[23] Raul Caruso, *The Impact of International Economic Sanctions on Trade An empirical Analysis*, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dalam

orang-orang mereka yang sangat kuat di arena internasional, sementara rezim kuat telah memiliki posisi dan tidak takut untuk membuat kompromi bila diperlukan.

Setelah India melakukan tes uji coba senjata nuklir pada bulan Mei, sebagai negara yang aktif dalam mengkampanyekan non-proliferasi Amerika Serikat memberikan seruan keras dengan cara menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap India. Hal ini di lakukan Amerika Serikat sebagai bentuk hukuman bagi India yang dianggapnya membahayakan rezim non-proliferasi dan membuka kemungkinan bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama dengan India. Cara ini juga sebagai peringatan terhadap negara-negara lain agar tidak bertindak sama dengan India atau akan dijatuhkan sanksi seperti India.

Sanksi-sanksi ekonomi itu berbentuk penundaan bantuan ekonomi dan larangan pinjaman bank Amerika. Kemudian juga pelarangan pada pelaku ekonomi di Amerika Serikat untuk melakukan kegiatan ekonmi dengan India. Sehingga perekonomian India akan mengalami penurunan terutama pada sektor bantuan asing, perdagangan, dan investasi.

E. HIPOTESA

Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap India telah berdampak pada penurunan kerja kegiatan ekonomi India terutama dalam sektor bantuan asing,

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Lebih jauh, pembatasan dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai satu hasil yang spesifik dan terarah, pada penelitian ini penulis akan membatasi kajian mengenai dampak sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap perekonomian India akibat dari uji coba nuklir India pada tahun 1998.

G. METODE PENELETIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif). Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa lampau. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[24]

Proses pembuatan penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari hasil atau dokumentasi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui *library research* (studi kepustakaan). Teknik Pengumpulan Data ini mengmbil referensi dari berbagai literatur, jurnal,

---

[24] [illegible] Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal 63

laporan penelitian, internet serta berbagai liputan yang ditampilkan dari majalah maupun koran.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab akan dijelaskan secara berkesinambungan melalui sub-sub bab agar terbentuk karya ilmia yang sistematis.

BAB I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mengemukakan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. SEJARAH INDIA DAN PENGAWASAN SENJATA DUNIA

Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya negara India dan juga sejarah perkembangan senjata nuklir India, serta menjelaskan sejarah perkembangan pengawasan senjata dunia dengan beberapa perjanjian internasional seperti *Nonproliferation Treaty* (NPT) dan *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) yang menjadi alasan utama dijatuhkannya sanksi ekonomi kepada India.

Bab ini akan menguraikan tentang dasar Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap India serta menjelaskan bagaimana bentuk sanksi ekonomi yang di jatuhkan kepada India.

BAB IV. KONDISI PEREKONOMIAN INDIA SEPUTAR SANKSI EKONOMI

Bab ini mencoba untuk menjelaskan tentang dampak dari sanksi ekonomi terhadap kondisi perekonomian India yaitu dengan menganalisa kondisi perekonomian India sebelum dan sesudah sanksi ekonomi khususnya perdagangan luar negeri, investasi asing, dan cadangan devisa.

BAB V. KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari